

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terjadi di Indonesia pada saat ini banyak yang membantu manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan itu membawa dampak perubahan besar dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami bangsa Indonesia ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan dan penderitaan yang ada dalam masyarakat luas, didalam situasi tersebut menyebabkan timbulnya banyak organisasi yang bergerak dalam bidang sosial atau dengan kata lain organisasi nirlaba (Chenly, 2013).

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit merupakan suatu organisasi yang besaran pokoknya untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Organisasi nirlaba diantaranya meliputi; organisasi kemanusiaan, keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politik, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, serikat buruh, organisasi sukarelawan (Kolang, 2008).

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis lainnya. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas kegiatannya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi

tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, didalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan dana sumbangan (Hendrawan, 2011).

Laporan merupakan suatu proses dari akuntansi, menurut IAI (2012) mendefinisikan laporan keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan kepada mereka.

Secara umum laporan keuangan organisasi nirlaba harus mengacu pada PSAK 45 (revisi 2011), yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSAK 45 disebutkan para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, dan cara pengurus organisasi melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya. Dengan mengikuti standar pelaporan PSAK 45 tersebut, laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami oleh para penggunanya, memiliki relevansi, serta dapat dibandingkan (IAI, 2011).

Berdasarkan PSAK 45 (revisi 2011) laporan keuangan entitas nirlaba meliputi; laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan yang mengilustrasikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan. Laporan keuangan organisasi nirlaba yang berisi tentang dana sumbangan dari berbagai pihak yang harus segera dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Organisasi Nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung mengedepankan pada prioritas utama kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indikator penting secara akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga atau organisasi (Ayub, 2012).

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan salah satu organisasi nirlaba yang bergerak dibidang kemanusiaan yang tujuan pokok pelayanannya seperti pelayanan penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, peningkatan fungsi atau peran komunikasi & informasi dan pengembangan kapasitas organisasi. Disisi lain dalam pengelolaan sumber dayanya, PMI Juga dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat, tersaji secara tepat waktu bagi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan (AD/ART PMI).

Mengacu pada ketentuan Anggaran Rumah Tangga PMI tentang Perbendaharaan, bahwa kekayaan sumber dana Palang Merah Indonesia (PMI) diperoleh dari; bulan dana, subsidi pemerintah yang berasal dari APBN/APBD (Dana Hibah), sumbangan masyarakat atau perusahaan, sumbangan dari negara

donor (Mitra Kerja) dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan berlaku dan peraturan PMI (pmi.org).

Banyak para donatur yang sudah menyumbangkan dananya baik dari kalangan pribadi maupun perusahaan, untuk meringankan beban masyarakat yang sedang terkena musibah di Negara ini, sudah selayaknya organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) mencatat dan melaporkan kondisi keuangannya agar para pengguna laporan keuangannya seperti para pengurus, anggota, serta pemberi sumbangan mendapatkan informasi yang akurat tentang laporan keuangan tersebut (Cintokowati, 2010).

PMI sudah memiliki pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yang tertuang didalam juknis keuangan, juknis keuangan tersebut dibuat karena sebelumnya PMI belum mempunyai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan dan disetiap laporan keuangan baik itu ditingkat Provinsi dan Kabupaten bentuk laporannya tidak sama. Akibat dari ketidakseragaman tersebut, sehingga muncul adanya gagasan untuk membuat laporan keuangan PMI agar seragam dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas sehingga dapat dipahami oleh pengurus, anggota, serta pemberi sumbangan. Juknis keuangan itu sendiri dibuat melalui proses yang panjang mulai tahun 2009, dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan keuangan ditingkatan provinsi dan juknis tersebut baru ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2012 oleh ketua Umum PMI (pmi.org).

Kenyataan yang timbul dilapangan, banyak sekali pelanggaran yang terjadi, misalnya masalah pengiriman dana, didalam juknis keuangan menyebutkan bahwa PMI Pusat akan mengirimkan dana ke PMI Provinsi setelah

menerima dana dari mitra kerja selambat-lambatnya lima hari, tapi kenyataannya bisa sampai dua atau tiga bulan lebih sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang tertunda dan pengiriman laporan keuangan terlambat sehingga pihak mitra kerja tidak mengirimkan dana lagi karena belum menerima laporan pertanggung jawaban dana.

PMI Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penerima dana terbesar dari mitra kerja, hal ini ditunjukkan dengan banyak para donator yang menyumbangkan dananya ke PMI Provinsi Jawa Timur, misalnya *Unicef*, *Zurich Insurance*, *AIFDR*, *Norwegian Red Cross*, *Canadian Red Cross*, *Danish Red Cross* dan masih banyak lagi. Akibat dari banyaknya mitra kerja yang ada di PMI Provinsi Jawa Timur, sehingga PMI Provinsi Jawa Timur dituntut untuk dapat menyajikan dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban dananya tepat waktu sehingga program yang sudah dijadwalkan dapat berjalan sesuai dengan mestinya dan proses pengiriman dananya tidak terhambat (pmi.org).

Penelitian tentang analisis penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Antara lain oleh Wibisono (2009) melakukan penelitian berjudul: Penerapan PSAK No. 45 Terhadap Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pusdakota Ubaya. Hasil evaluasi dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, pengakuan terhadap biaya penyusutan untuk aset tetap. Penyusutan harus diakui untuk setiap tahunnya yang akan mengurangi nilai buku dari tiap aktiva tetap yang dimiliki oleh organisasi nirlaba. Pencatatan

untuk penyusutan adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Penghitungan ini dilakukan untuk akurasi laporan keuangan yang disajikan.

Nasiruddin (2009) melakukan penelitian berjudul: Evaluasi Penerapan PSAK NO.45 Pada Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan untuk DPD PKS Kabupaten Malang menggunakan buku kas partai yang didalamnya hanya memuat penerimaan kas secara tunai. Laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan PSAK No 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena itu DPD PKS seharusnya menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba yang terbagi atas 4 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Terdapat dua jenis laporan keuangan didalam PMI Provinsi Jawa Timur, yaitu laporan keuangan lembaga (dana yang berasal dari dana hibah atau APBD) dan laporan keuangan program (dana yang berasal dari sumbangan). Laporan keuangan lembaga terdiri dari; realisasi anggaran, realisasi triwulan, laporan pertanggungjawaban per-bulan dan rekening koran, sedangkan laporan keuangan program terdiri dari realisasi anggaran, laporan posisi keuangan, buku bank dan rekonsiliasi bank, buku kas dan *cash op name* serta laporan per-kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi untuk meneliti laporan keuangan program PMI Provinsi Jawa Timur, apakah laporan yang dibuat berdasarkan pedoman juknis keuangan sudah mengacu pada pembuatan laporan keuangan organisasi nirlaba, dalam hal ini mengacu pada PSAK 45 dan

bagaimana implementasi yang terjadi dilapangan tentang penerapan juknis keuangan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah laporan keuangan program PMI Provinsi Jawa Timur yang berpedoman pada juknis keuangan PMI sudah mengacu pada PSAK No.45 (revisi 2011) tentang laporan keuangan entitas nirlaba?
2. Kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan tentang penerapan juknis keuangan dalam laporan keuangan program di PMI Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis laporan keuangan program PMI Provinsi Jawa Timur yang berpedoman pada juknis keuangan PMI sudah mengacu pada PSAK No.45 (revisi 2011) tentang laporan keuangan entitas nirlaba
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan tentang penerapan juknis keuangan PMI sehingga dapat memberi masukan yang bermanfaat.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan penelitian karena mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang ada, maka penelitian ini dibatasi :

1. Batasan lokasi dalam penelitian ini adalah meliputi PMI Provinsi Jawa Timur yang dananya hanya didanai oleh *Danish Red Cross* dan daerah programnya hanya meliputi PMI Kabupaten Malang dan PMI Kabupaten Jember.
2. Batasan waktu penelitian ini adalah hanya meliputi tahun 2011-2013 untuk program Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana yang ada di PMI Provinsi Jawa Timur karena perjanjian kerjasama antara PMI dengan *Danish Red Cross* untuk program di Jawa Timur berakhir tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi PMI Provinsi Jawa Timur
Dapat memberikan sumbangan informasi bagi PMI Provinsi Jawa Timur agar dapat menerapkan perlakuan akuntansi organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK No. 45

2. Bagi Akademisi

Dapat memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan tentang penerapan PSAK No. 45 di PMI Provinsi Jawa Timur.